

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menguraikan permasalahan ini bukanlah upaya penelitian pertama yang pernah dilakukan dalam topik penelitian ini. Penulis menggunakan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai salah satu bahan referensi dan juga dasar pengembangan untuk pemecahan masalah.

Penelitian yang dilakukan oleh M.Y Tinas Tinov dan Baskoro Wicaksono (2015) dalam penelitian mereka yang berjudul “Gaya Komunikasi Politik Presiden Joko Widodo dalam Menyikapi Isu-Isu Kebijakan Publik Melalui Media Massa”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi politik dan teori kebijakan publik. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintahan era Presiden Jokowi cenderung menyikapi isu yang menjadi trending topic di media online dan yang memiliki popularitas tinggi. Selain itu juga Presiden Jokowi yang menggunakan gaya komunikasi low context culture ketika menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan menyesuaikan kultur masyarakat setempat.

Adapun persamaan yang ada di penelitian ini dengan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah:

1. Sama-sama meneliti tentang pemerintahan Presiden Jokowi dalam pembahasannya.
2. Menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif dan jenis penelitian yang deskriptif.
3. Menggunakan teori komunikasi politik

Selain persamaan, terdapat juga perbedaan pada kedua penelitian yakni:

1. Jika pada penelitian sebelumnya cenderung fokus hanya pada karakter Jokowi sebagai presiden, maka dalam penelitian sekarang tidak hanya berfokus pada seorang presiden Jokowi namun juga pada dinamika pemerintahan yang dijalankan terutama pada kondisi yang tercipta akibat pola komunikasi politik yang digunakan.
2. Pada penelitian sekarang yang dibuat oleh penulis, objek penelitian tidak hanya pemerintahan Jokowi tetapi juga pemerintahan SBY.
3. Berkaitan dengan poin kedua, penelitian ini juga berbentuk komparatif dengan membandingkan dua objek penelitian.

Penelitian selanjutnya yang menjadi salah satu sumber referensi penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Satrio Bakti Wicaksono dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Pesan dan Komunikasi Politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada penelitian ini membahas tentang Dalam penelitian ini berusaha menganalisa peran SBY sebagai komunikator politik selama menjalankan pemerintahannya. Hasil pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini sangat berfokus pada atribut-atribut SBY dalam menjalankan komunikasi politiknya seperti menjelaskan mengenai keberadaan juru bicaranya, keputusannya untuk terjun dalam media sosial saat mendekati akhir masa ke pemerintahannya, dan pesan politik yang disampaikan SBY dalam beberapa isu dan peristiwa politik. Selain itu juga menjelaskan tipe dan gaya kepemimpinan SBY selama menjalankan pemerintahannya.

Adapun terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis buat. Persamaan dari penelitian tersebut adalah:

1. Selain menyoroti presiden sebagai komunikator politik utama, penelitian ini juga membahas komunikasi politik pemerintahan secara menyeluruh.
2. Pada penelitian ini, selain membahas presiden SBY juga membahas presiden Jokowi sebagai komunikator politik.

Selain persamaan, pada penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu:

1. Dalam penelitian ini, presiden SBY fokus menjadi bahan utama pembahasan sebagai komunikator politik yang utama dalam pemerintahannya.
2. Terkait dengan poin pertama, pada penelitian ini kurang menggali unsur-unsur komunikasi politik lainnya selain pada presiden sebagai fokus utama pembahasan.

Selain itu juga dapat dilihat di tabel bawah ini penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas masalah yang sama yang menjadi bahan acuan penulis dalam penelitian ini:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1. M.Y Tinas Tinov dan Baskoro Wicaksono	Gaya Komunikasi Politik Presiden Joko Widodo dalam Menyikapi Isu-Isu Kebijakan Publik Melalui Media Massa	Kesimpulan dari penelitian ini adalah Presiden Jokowi yang menggunakan pola komunikasi politik Low Context Communication ketika memberikan informasi kepada masyarakat menyesuaikan dengan kultur masyarakat setempat. Namun sayangnya, informasi yang disampaikan seringkali berbeda dengan para pejabat pembantunya. Seperti miskom yang sering terjadi pada pejabat menteri dan jajarannya yang menimbulkan	1. Jika pada penelitian sebelumnya cenderung fokus hanya pada karakter Jokowi sebagai presiden, maka dalam penelitian sekarang tidak hanya berfokus pada seorang presiden Jokowi namun juga pada pemerintahan yang dijalankan terutama pada kondisi yang tercipta akibat pola komunikasi politik yang digunakan. 2. Pada penelitian sekarang, objek

		<p>kegaduhan di publik. Hal inilah yang menjadi dasar pembentukan tim komunikasi politik untuk mengatasi permasalahan tersebut.</p> <p>Adapun gaya komunikasi politik tersebut di satu sisi meningkatkan partisipasi dan antusias masyarakat akan politik tetapi di sisi lain hal ini memunculkan pencitraan semata.</p>	<p>penelitian tidak hanya pemerintahan Jokowi tetapi juga pemerintahan SBY.</p> <p>3. Berkaitan dengan poin kedua, penelitian ini juga berbentuk komparatif dengan membandingkan dua objek penelitian.</p>
2. Satrio Bakti Wicaksono	<p>Pesan dan Komunikasi Politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono</p>	<p>Dalam penelitian ini berusaha menganalisa peran SBY sebagai komunikator politik selama menjalankan pemerintahannya.</p> <p>Hasil pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini sangat berfokus pada atribut-atribut SBY dalam menjalankan komunikasi politiknya seperti menjelaskan mengenai keberadaan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak di fokus analisa, dimana penelitian sebelumnya hanya fokus pada peran SBY sebagai komunikator politik dengan menyorot pribadinya sebagai pusat utama perhatian. Dalam penelitian kali ini, selain memang juga membahas presiden</p>

		<p> juru bicaranya, keputusannya untuk terjun dalam media sosial saat mendekati akhir masa pemerintahannya, dan pesan politik yang disampaikan SBY dalam beberapa isu dan peristiwa politik. Selain itu juga menjelaskan tipe dan gaya kepemimpinan SBY selama menjalankan pemerintahannya. </p>	<p> lain yakni Jokowi namun juga berfokus pada pemerintahannya secara keseluruhan sebagai komunikator politik, tidak hanya individunya. </p>
<p> 3. Rangga Saptya Mohamad Permana dan Evi Rosfiantika </p>	<p> KAJIAN KOMUNIKATOR POLITIK INDONESIA PERIODE 2009-2014: ANALISIS KOMUNIKASI POLITIK SUSILO BAMBANG YUDHOYONO </p>	<p> Dalam penelitian ini juga memfokuskan diri pada peran SBY sebagai komunikator politik selama masa pemerintahannya. Selain itu juga fokus pada pembahasan komunikasi politik SBY berdasarkan konsep-konsep komunikasi politik seperti buku karya Dan Nimmo (2005) dan buku karya Harun dan </p>	<p> Perbedaan terletak pada subjek dan objek dalam penelitian ini, dimana subjek penelitian ini adalah presiden SBY itu sendiri dan objek penelitian ini adalah periode kedua pemerintahan SBY 2009-2014. Selain itu juga penelitian ini bersifat me-review komunikasi politik </p>

		<p>Sumarno (2006). Dalam penelitian ini mengambil contoh kasus-kasus yang terjadi selama pemerintahan SBY lalu dibahas menggunakan konsep komunikasi politik dari kedua buku tersebut. Hasil pembahasan penelitian ini sebagian besar meliputi periode pertama ke pemerintahannya yang dipenuhi dengan pencapaiannya dalam mengkomunikasikan kebijakan Indonesia baik dalam maupun luar negeri. Lalu pada periode kedua pemerintahannya yang dilanda dengan masalah internal partai dan koalisi pemerintahannya yang tidak bisa mengkonsolidasikan PKS sebagai bagian dari koalisi. Sehingga</p>	<p>SBY secara keseluruhan pada periode kedua pemerintahannya, sedangkan pada penelitian kali ini akan bersifat membandingkan atau to compare komunikasi politik pemerintahan SBY dan Jokowi dalam menyikapi isu di pemerintahannya masing-masing.</p>
--	--	--	---

		<p>dapat terlihat masing-masing kelebihan dan kekurangan komunikasi politik SBY selama pemerintahannya.</p>	
--	--	---	--

2.2. Kerangka Konsep

2.2.1. Komunikasi Politik

Komunikasi Politik adalah suatu proses dan kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan simbol-simbol yang berarti.

Dalam praktiknya, komunikasi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia yang tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik.

Komunikasi Politik merupakan komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah.

Komunikasi politik itu juga lebih ke arah kepentingan politik yang tentunya melibatkan aktor atau agen politik dalam hal penyampaian informasi politik.

Menurut Miriam Budiharjo, dalam memahami komunikasi politik sebagai salah satu fungsi partai politik, yaitu menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat Serta mengaturnya sedemikian rupa – penggabungan kepentingan (*interest aggregation*) dan perumusan kepentingan (*interest articulation*) – untuk diperjuangkan menjadi kebijakan politik.¹

Dalam komunikasi politik terdapat lima komponen yakni ;

1. Komunikator politik -Berperan sebagai penyampai pesan politik.
2. Pesan politik – Isi atau informasi politik.

¹ Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm.405

3. Saluran Komunikasi Politik – Media atau alat berkomunikasi politik.
4. Komunikan Politik – Penerima pesan atau informasi politik.
5. Efek Politik – Dampak dari pesan politik yang disampaikan.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Komunikasi Politik

Secara umum juga pesan politik yang disampaikan kepada masyarakat memiliki 4 (empat) tujuan utama yaitu: 1). Mengubah Sikap (*to change attitude*), 2) Mengubah Pandangan atau Pendapat (*to change view or opinion*), 3) Mengubah Perilaku (*to change behavior*), 4) Mengubah Masyarakat (*to change society*). Dari keempat tujuan tersebut, diharapkan ketika komunikator menyampaikan pesannya kepada komunikan/masyarakat dapat mencapai 4 poin tujuan tersebut.

Dalam komunikasi politik, pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan/khalayak memiliki tujuan untuk membangun citra positif sehingga memiliki elektabilitas tinggi untuk dipilih, untuk kemudian dapat membuat kebijakan publik.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Sumarno dan Harun, komunikator politik harus memiliki beberapa syarat agar proses komunikasi yang diharapkan dapat tercapai, yakni:²

1. Memiliki Nuansa yang luas tentang berbagai aspek dan masalah-masalah kenegaraan
2. Memiliki komitmen moran terhadap sistem nilai yang sedang berlangsung
3. Berorientasi kepada kepentingan negara
4. Memiliki Emotional Intelegence
5. Jauh dari sikap hipokrit/munafik (*Cognitive dissonance*)

Dalam prosesnya, komunikator politik semestinya menggunakan peran media massa sebagai platform utama untuk menyampaikan pesan politiknya agar membentuk citra politik yang diharapkan. Tentunya juga, komunikator politik akan mengolah sedemikian rupa pesan politiknya agar dapat menghasilkan efek yang diharapkan, salah satunya bentuk simpati dan dukungan pihak masyarakat yang menjadi pemilih. Bagi masyarakat sendiri sebagai konstituen, citra yang baik dari komunikator politik merupakan salah satunya jika bukan syarat utama agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan mendapat respon yang baik pula oleh masyarakat.

² Rochajat Harun, Sumarno AP. *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*. (Bandung: Mandar Maju, 2006) Hlm. 25

Menurut Dan Nimmo, Komunikasi politik dalam hubungannya dengan media, memiliki lima fungsi dasar, yaitu :³

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Disini media komunikasi memiliki fungsi pengamatan dan fungsi monitoring untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam masyarakat.
2. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada. Disini para jurnalis diharapkan melihat fakta yang ada sehingga berusaha membuat liputan yang objektif (objective reporting) sehingga bisa mendidik masyarakat luas atas realitas fakta tersebut.
3. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk public opinion, dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat. Dengan cara demikian, media bisa memberi arti dan nilai pada usaha penegakan demokrasi.
4. Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan institusi politik, Disini media bisa berfungsi sebagai watchdog dalam membantu terciptanya good governance yang transparan dan akuntabel.
5. Dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagai saluran pembela yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program institusi politik dapat disalurkan kepada media massa.

Pesan politik yang disampaikan sudah pastinya sarat dengan tujuan komunikasi politik itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan komunikasi politik ada kalanya hanya sekedar menyampaikan informasi politik. Namun, dapat juga melalui penyampaian informasi tersebut juga berusaha melakukan upaya pencitraan politik melalui jenis informasi yang disampaikan tentunya. Selain itu dengan menyampaikan informasi yang tepat, juga dapat membantu membentuk opini publik mengenai suatu permasalahan, sehingga dalam waktu yang tepat dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik menjadi peluang untuk menaikkan elektabilitasnya dalam menghadapi pemilihan umum. Tentunya masyarakat yang melihat tokoh-tokoh politik yang mampu menarik simpati dan dukungannya kepada tokoh-tokoh tersebut akan memberikan suara dan dukungannya dalam kegiatan pemilihan umum.

³ Thomas Tokan Pureklolon. *Komunikasi Politik: mempertahankan integritas akademisi, politikus, dan negarawan*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2016). Hlm. 138-139

2.2.3 Pola-Pola Komunikasi Politik

Adapun pola-pola komunikasi politik yang tersusun di antaranya :

1. Pola komunikasi vertikal (top down, dari pemimpin kepada yang dipimpin).
2. Pola komunikasi horizontal (antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok).
3. Pola komunikasi formal (komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal).
4. Pola komunikasi informal (komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi).
5. Pola Komunikasi Sirkuler (komunikasi yang berputar antar unsur-unsur komunikasi) ⁴



2.3 Kerangka Teori

2.3.1 Teori Sistem Politik

Kebijakan merupakan suatu produk atau keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Proses pembuatan kebijakan itu sendiri merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan kompleks serta tidak semudah yang dibayangkan. Kebijakan juga dipandang sebagai sebuah proses, dimana sebagai proses politik yang digambarkan sebagai sebuah siklus. Siklus itu sendiri terdapat dalam suatu sistem dimana satu unsur dengan unsur lainnya berkaitan erat dan tidak dapat terpisahkan. Sehingga pada penelitian ini, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM terbentuk karena adanya keterkaitan antar satu unsur dengan unsur lainnya.

⁴ Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)

Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh David Easton, suatu kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil konversi dari input berupa tuntutan maupun dukungan yang diperoleh secara sistematis oleh sistem politik sehingga menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan yang disebut sebagai output.⁵ Output yang dihasilkan berupa sebuah kebijakan, yang dapat diterima atau ditolak oleh lingkungan tergantung pada input yang telah dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan asumsi Easton tersebut, proses dalam setiap sistem melibatkan adanya unsur input dan unsur output. Input itu sendiri merupakan sebuah masukan berupa tuntutan dan dukungan serta aspirasi dari masyarakat yang berfungsi sebagai materi atau bahan bagi pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan. Input ini nantinya diolah menjadi output, kebijakan, keputusan, yang akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial.

Terdapat setidaknya 4 (empat) ciri-ciri yang perlu dipahami dalam mempelajari sistem politik menurut David Easton, yaitu:

1. Unit-unit dan Batasan-batasan Suatu Sistem Politik

Dalam kerangka sistem politik, terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama menggerakkan roda sistem politik. Unit ini adalah lembaga-lembaga yang memiliki wewenang atau otoritas dalam menjalankan tugasnya seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sebagainya. Unit-unit ini bekerja dalam satu batasan atau wilayah seperti dalam suatu negara, provinsi, kota, kabupaten, dan lainnya.

Untuk dapat membedakan antara sistem politik dengan lingkungannya, maka sistem politik mempunyai batas-batas tertentu. Batas suatu sistem politik ditentukan oleh unsur tindakan yang kurang lebih berhubungan dengan pengambilan keputusan yang mengikat (otoritatif) bagi suatu masyarakat. Setiap aksi sosial yang tidak memiliki ciri-ciri ini sudah jelas tidak termasuk ke dalam sistem politik.

2. Input-Output

Input merupakan masukan dari masyarakat mengenai suatu isu atau permasalahan. Input yang masuk ke dalam sistem politik dapat berupa tuntutan, aspirasi, maupun dukungan.

Tuntutan merupakan sebuah seperangkat kepentingan yang belum dialokasikan secara

⁵ Easton, David. 1988. *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*. Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 42

merata oleh sistem politik kepada suatu kelompok masyarakat yang berada dalam cakupan sistem politik. Dukungan merupakan upaya dari masyarakat untuk mendukung keberadaan sebuah sistem politik untuk terus berjalan.

Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan ataupun dukungan dari masyarakat. Output sendiri terbagi menjadi dua, yaitu keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai dengan tuntutan dan dukungan yang masuk. Tindakan adalah implementasi atau wujud nyata dari pemerintah dari keputusan yang dibuat.

3. Diferensiasi dalam Sistem

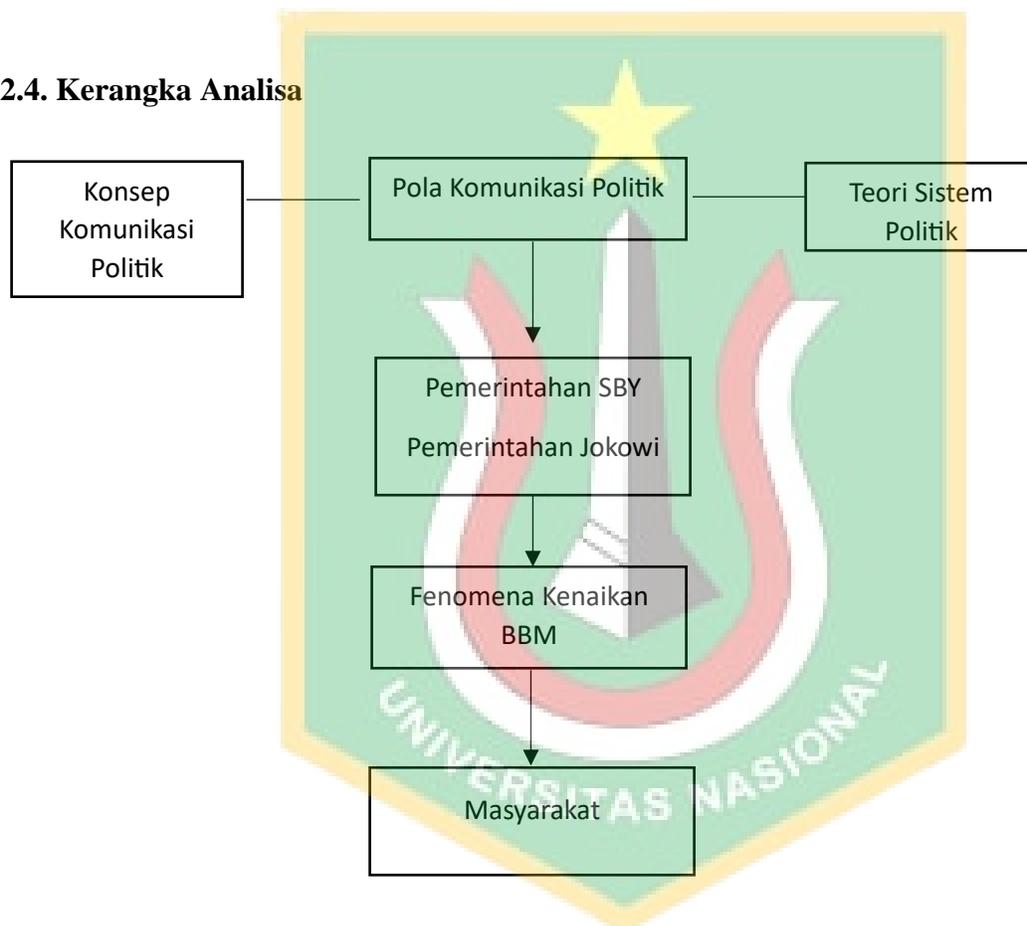
Sistem politik yang baik harus memiliki perbedaan atau pemisahan bidang tugas. Terlebih di era modern ini yang tidak mungkin bagi satu lembaga untuk menjalankan semua tugas dan menyelesaikan seluruh permasalahan. Misalnya dalam penelitian ini, dalam menanggapi fenomena kenaikan BBM secara global, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan kementerian ESDM atau Menko Perekonomian dalam mengambil suatu keputusan. Pemerintah juga harus melibatkan legislatif yakni DPR untuk mendapatkan masukan berupa tuntutan dan aspirasi dari masyarakat, sehingga kebijakan nanti yang akan diambil oleh pemerintah memiliki manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

4. Integrasi dalam Sistem

Meskipun dikehendaki agar memiliki diferensiasi, suatu sistem juga tetap harus memperhatikan aspek integrasi. Integrasi sendiri adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama.⁶

⁶ Ibid. Hlm .76

2.4. Kerangka Analisa



Penulis merancang kerangka berpikir ini guna membantu menyesuaikan penulisan penelitiandengan bagian pembahasan di penelitian nanti. Dari kerangka ini, diuraikan mengenai pola komunikasi politik yang ada di kedua pemerintahan SBY dan Jokowi. Dari kedua pemerintahan ini dicari tahu persamaan dan perbedaannya yang nantinya akan berpengaruh dalam menganalisa pola komunikasi politik kedua pemerintahan dalam konteks fenomena kenaikan BBM, baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan metode perbandingan. Dengan metode perbandingan . Disini masyarakat merupakan rantai paling bawah dan yang paling akhir

mendapatkan dampak dari dinamika politik yang dihasilkan dari pola komunikasi politik kedua pemerintahan tersebut. Ranah masyarakat menjadi arena bagi dinamika politik yang ada sebagai reaksi dari kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM, yang semuanya bermuara pada pola komunikasi politik yang terjadi di tingkat pemerintahan.

